

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI DAERAH TEPIAN SUNGAI KECAMATAN AMUNTAI
SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(STUDI KASUS DESA PADANG TANGGUL)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi Pada Program Studi
Administrasi Publik



OLEH:

RAMONA

NPM: 2022322

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, Tuhan semesta alam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikannya proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH TEPIAN SUNGAI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA PADANG TANGGUL)”**. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Terwujudnya proposal skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan Syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP., CIQaR, CIQnR selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Ahmad Baihaqi S.Sos., M.A. Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd., M. AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan banyak pengarahan, bimbingan

dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

5. Bapak Selamat Riadi, S.Sos., M. AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan banyak pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis berharap proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Februari 2026

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	10
C. Kerangka Berpikir.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Tipe Penelitian	21
D. Data dan Sumber Data	22
E. Desain Operasional Penelitian.....	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data	27
H. Uji Kredibilitas Data	28

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	23
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah menjadi isu penting yang terjadi seiring dengan perkembangan dan aktivitas pembangunan yang terus meningkat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang mengharuskan pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan landasan hukum dan kejelasan tanggung jawab guna mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.

Masalah sampah merupakan isu global yang semakin kompleks dan mendesak untuk diatasi. Di Indonesia, jumlah sampah terus meningkat setiap tahunnya, terutama di daerah perdesaan. Permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah mengenai sampah, permasalahan sampah yang terlihat saat ini yaitu sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya dan polusi air yang dikarenakan penanganan air yang kurang tepat serta menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit dan juga banjir.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah. Banyak sungai yang mengalami pencemaran akibat sampah domestik, termasuk plastik dan limbah rumah tangga, yang berasal dari masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Praktik pembuangan sampah langsung ke sungai sering terjadi akibat

tidak tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan kurangnya perhatian dari pemerintah desa.

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk di Desa Padang Tanggul Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mengalami peningkatan yang juga memengaruhi produksi timbulan sampah. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran dan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan dalam pengelolaan sampah di daerah.

Berbicara mengenai masalah sampah, banyak masyarakat yang tidak mematuhi adanya aturan, khususnya daerah pinggiran sungai, masih banyak sampah yang menumpuk di tepian dan di genangan sungai dikarenakan kurangnya sarana prasarana dan kesadaran masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak selalu berjalan efektif. Penelitian pada berbagai daerah menunjukkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, koordinasi antar-aktor yang lemah, serta komunikasi kebijakan yang belum optimal.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Dengan hal itu, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Peraturan daerah yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang, organisasi,

maupun lembaga/instansi namun kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Selain pemerintah, partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih belum maksimal.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan mengenai sampah, pemerintah daerah telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Pemerintah perlu menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat supaya membuang sampah ke sungai tidak menjadi kebiasaan. Pembuangan sampah di sungai juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang menggunakan air, selain itu apabila air sungai meluap maka akan banyak sampah-sampah yang sangkut di tepian sungai.

Masyarakat Desa Padang Tanggul masih ada yang tidak menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai. Kebiasaan masyarakat Desa Padang Tanggul membuang sampah ke sungai juga dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti tidak banyaknya tempat sampah dan tidak tersedianya layanan angkutan sampah.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena-fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan, diantaranya:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul, terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sampah, yang mana masih ditemukannya praktik pembuangan sampah di sungai dan di tepian sungai oleh masyarakat.

2. Keterbatasan fasilitas persampahan, seperti kurangnya tempat sampah dan tidak tersedianya layanan angkutan sampah, sehingga masyarakat kebiasaan menumpuk sampah di tepian sungai dan membuang sampah ke sungai.
3. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat untuk tidak menjadikan kebiasaan membuang sampah di sungai dan di tepian sungai.

Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk mempertegas fakta atau fenomena serta ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan, terhadap permasalahan menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas.

Maka peneliti memfokuskan penelitian dalam model Implementasi Kebijakan Jan Merse (Reno Affrian, 2023: 47-48) yaitu:

1. Informasi
2. Isi Kebijakan
3. Dukungan Masyarakat
4. Pembagian Potensi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus

Desa Padang Tanggul). Dan sebagai bahan masukan bagi Desa Padang Tanggul dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu penelitian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Atika Ariani (2023), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)

Amuntai. Dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung)”**. Fenomena masalah dari penelitian tersebut yaitu terdapat pada Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung yang tidak memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kabupaten kepada masyarakat, dan kurang kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Donald Van Metter & Carl Van Horn dan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor

38 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung) belum baik terdapat 6 subvariabel dan 14 indikator, terdapat 10 indikator belum baik dan 4 indikator cukup baik. Indikator yang cukup baik yaitu tujuan, koordinasi, kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Sedangkan indikator yang belum baik yaitu ukuran keberhasilan, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya waktu pelaksanaan, organisasi formal, organisasi informal, respon implementor, kognisi permasalahan, kerjasama, dan kondisi politik. Adapun faktor pendorong yaitu tujuan dan koordinasi, faktor penghambat yaitu tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat.

2. **Mira Jayanti (2022), Universitas Pasundan.** Dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Studi Kasus: Desa Banjaran)”**. Fenomena masalah dari penelitian tersebut adalah tingginya volume penumpukan sampah yang ada di kabupaten Bandung. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diakibatkan dari kegiatan masyarakat. Desa Banjaran memiliki masalah sampah yang sudah menahun, banyak tumpukan sampah yang tersebar di beberapa titik di desa Banjaran. Titik-titik tumpukan sampah yang ada di Desa Banjaran ialah seperti di lahan kosong, di perkampungan wilayah desa Banjaran dan di pinggir jalan Banjaran-Soreang. Selain itu juga penumpukan yang terjadi di Desa Banjaran dikarenakan oleh keterbatasan lahan untuk

mengelola sampah di desa banjaran dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah banyak menumpuk di pinggir jalan dan di lahan kosong dan masih banyak masyarakat yang membakar sampahnya menyebabkan polusi udara, hal tersebut membahayakan kesehatan. Teori yang dipakai penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan model Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Organisasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (studi kasus: Desa Banjaran) bahwa komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bersama pelaksana kebijakan pengelolaan sampah Desa Banjaran sudah dilaksanakan, namun belum maksimal. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung belum memadai sehingga menghambat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Disposisi dan struktur birokrasi sudah dilakukan cukup baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Namun, dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan optimal. Maka dari itu, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat secara konsisten agar pengelolaan sampah dilakukan secara keseluruhan, mandiri dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep sentral dalam studi administrasi publik dan kebijakan publik karena menjadi instrumen utama pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Menurut David Easton (Rahayu, 2016:17) memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu alokasi nilai-nilai secara sah untuk seluruh anggota masyarakat. Eulau dan Prewitt (Agustino, 2022:15-16) mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Thomas R. Dye (Rahayu, 2016:17) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever the governments choose to do or not to do*). Pandangan ini menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak bertindak terhadap suatu masalah publik juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat. Sementara itu, Anderson (Agustino, 2022:16) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih serta dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat mengikat, memiliki tujuan tertentu, dan ditujukan untuk mengatasi permasalahan publik serta memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Kebijakan publik tidak berdiri sebagai keputusan tunggal, melainkan sebagai proses yang melibatkan aktor-aktor pemerintah, tujuan yang jelas, serta konsekuensi nyata bagi masyarakat. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

b. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Dewi (2022:22), maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah umum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kebijakan publik pada hakikatnya disusun untuk menyelesaikan masalah publik yang dihadapi masyarakat serta mengarahkan tindakan pemerintah agar tujuan tertentu dapat tercapai secara efektif dan efisien.

c. Tahapan dan Proses Kebijakan Publik

Tahapan dan proses kebijakan publik dapat berbeda-beda tergantung pada konteks, isu, dan lingkup kebijakan yang dibahas. Namun secara umum, tahapan dan proses kebijakan publik dalam Kurhayadi (2023: 8-9) dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Identifikasi Masalah. Tahap pertama dalam proses kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu ditangani oleh

pemerintah atau masyarakat. Identifikasi masalah bisa dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, atau pakar.

- 2) Perumusan Kebijakan. Setelah masalah diidentifikasi, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Proses perumusan kebijakan meliputi pengumpulan data, analisis kebijakan yang ada, konsultasi dengan para ahli, dan dialog dengan masyarakat atau kelompok terkait.
- 3) Penetapan Kebijakan. Setelah proses perumusan kebijakan selesai, kebijakan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk keputusan atau peraturan yang resmi. Kebijakan ini biasanya dibuat oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, seperti kementerian, badan atau lembaga negara.
- 4) Implementasi Kebijakan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan dalam praktik. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lain-lain yang bertugas untuk melaksanakan program atau kebijakan yang telah ditetapkan.
- 5) Evaluasi kebijakan. Tahap terakhir dalam proses kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan yang ada.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2022:146) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Sedangkan Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2022:146) berpendapat bahwa

implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok, pejabat-pejabat, pemerintah ataupun swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Pramono (2020:4) implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. M

Menurut Edward III 1980 (Syahrudin, 2019:27) Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhi. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Hal ini dipertegas oleh Udoji (Agustino, 2022:147) Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan, kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

b. Model Implementasi Kebijakan

1) Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Van Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) mengembangkan sebuah pendekatan yang disebut dengan *Model of the Policy Implementation* atau model pendekatan *top-down*. Model ini memiliki asumsi bahwa implementasi dari sebuah kebijakan adalah linier mulai dari ketersediaan keputusan politik, pelaksanaannya, dan kinerja dan kebijakan publik tersebut. Beberapa variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik adalah:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan,
- b) Sumber Daya,
- c) Karakteristik Agen Pelaksana,
- d) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana.
- e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
- f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

2) Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Edwards III (1980) menamakan model implementasi kebijakan dengan *Direct and Indirect Impact On Implementation*. Terdapat empat variabel dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

- a) Komunikasi,
- b) Sumber Daya,
- c) Disposisi, dan
- d) Struktur Birokrasi.

3) Model Implementasi Kebijakan Jan Merse

Model Jan Merse mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Informasi
- b) Isi Kebijakan
- c) Dukungan Masyarakat
- d) Pembagian Potensi.

Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses pelaksanaan program. Penegasan Jan Merse menunjukkan bahwa setiap implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Hal itu berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat di setiap implementasi kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan.

4) Model Merilee S. Grindle

Menurut Merille S. Grindle implementasi kebijakan dipengaruhi dua variabel, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Keberhasilan ditentukan oleh derajat penerapan dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup; kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana kebijakan program, dan sumber daya yang dikerahkan.

c. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Menurut Leo Agustino (2022:170-177) ada beberapa hal yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak yaitu:

- 1) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
- 2) Kesadaran untuk menerima kebijakan
- 3) Ada atau tidaknya sanksi hukum
- 4) Kepentingan pribadi atau kelompok
- 5) Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- 6) Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
- 7) Wujudnya kepatuhan selektif
- 8) Waktu
- 9) Sosialisasi
- 10) Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi.

3. Sampah

a. Pengertian Sampah

Di dalam Perda No. 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak lagi mempunyai nilai guna untuk pemiliknya dan dibuang ke lingkungan. Sampah dapat berupa bahan organik maupun anorganik yang dapat mengganggu fungsi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Secara umum, sampah adalah semua benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi benda sisa yang dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan semuanya berpotensi dianggap sebagai sampah selama tidak digunakan lagi. Sampah juga bisa didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Material sisa tersebut dapat berwujud zat padat, cair, hingga gas. Tidak jarang material seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan.

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan mengurangi dan menangani sampah. Menurut Waste Management 2021 pengelolaan sampah adalah aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan, diiringi oleh pemantauan dan regulasi pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah dilarang membuang sampah ke sungai-sungai, got ataupun saluran, jalan umum atau tempat umum lainnya. Pada masyarakat yang ada di desa khususnya Kecamatan Amuntai Selatan seperti Desa Padang Tanggul merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih membuang sampah ke sungai, yang disebabkan belum optimalnya kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Desa Padang Tanggul, terlihat dari rendahnya partisipasi

masyarakat mengenai sampah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menjadikan kebiasaan membuang sampah di sungai serta minimnya fasilitas persampahan seperti tidak tersedianya angkutan sampah sehingga menyebabkan menumpuknya sampah di tepian sungai yang mengakibatkan air sungai tercemar sehingga mengurangi kebersihan lingkungan.

c. Aturan Sampah

Sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Pasal 28-30 yaitu:

- 1) Waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dilakukan mulai pukul 20.00 wita sampai dengan 07.00 wita.
- 2) Pembuangan sampah dilakukan dengan cara sampah wajib dibungkus dengan kantong plastik atau sejenisnya, sampah ditempatkan pada bak sampah yang tersedia atau pada halaman rumah masing-masing yang dilalui mobil atau gerobak pengangkut sampah.
- 3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang meletakkan dan/atau membuang sampah di sembarang tempat, membuang sampah diluar waktu yang ditentukan, membuang sampah dengan cara yang tidak ditentukan, dan membuang atau menempatkan sampah khusus di tepi jalan umum, dan tidak dilakukan pengangkutan sampai dengan jam 09.00 wita.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti secara logis dan sistematis. Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul) dengan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Teori yang peneliti gunakan yaitu teori model implementasi kebijakan menurut Jan Marse (Reno Affrian, 2023:47-48) :

1. Informasi
2. Isi Kebijakan
3. Dukungan Masyarakat
4. Pembagian Potensi



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di daerah tepian sungai pada wilayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Padang Tanggul. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan ada tumpukan sampah di tepian sungai yang belum terangkut, dengan begitu dapat memudahkan peneliti untuk terjun langsung kelapangan mengadakan observasi dan penggalian data.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara mendalam dan jelas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul). Dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan penelitian

deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang akan dicermati.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung di lapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan akan di proses untuk tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2023:296), data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber aslinya. Data ini biasanya diberikan langsung oleh sumbernya kepada peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Menurut Sugiyono (2023:296) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data. Sumber data tersebut adalah informan, informan merupakan orang yang bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentang latar belakang penelitian, serta orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Kabid Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Disperkim LH Hulu Sungai Utara	1 Orang
2	Kepala Desa Padang Tanggul	1 Orang
3	Sekretaris Desa Padang Tanggul	1 Orang
4	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Tanggul	1 Orang
5	Ketua RT 1 Desa Padang Tanggul	1 Orang
6	Ketua RT 2 Desa Padang Tanggul	1 Orang
7	Ketua RT 3 Desa Padang Tanggul	1 Orang
8	Ketua RT 4 Desa Padang Tanggul	1 Orang
9	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang

10	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
11	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
12	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
13	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
Jumlah Informan		13 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional dalam variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukannya analisis. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan.

Desain Operasional Penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan informasi tentang variabel yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data. Variabel dalam penelitian ini mengambil teori yang dikemukakan oleh Jan Merse dalam (Reno Affrian, 2023:47-48). Penelitian ini terdiri dari 4 subvariabel yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

Adapun desain operasional penelitian dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Model Implementasi Kebijakan Jan Merse	Informasi	1. Penyaluran Informasi 2. Kejelasan Informasi
	Isi Kebijakan	1. Sasaran 2. Sarana dan Prasarana
	Dukungan Masyarakat	1. Partisipasi Masyarakat 2. Kepatuhan Masyarakat
	Pembagian Potensi	1. Pembagian wewenang dan tanggung jawab 2. Komitmen

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan atau kegiatan mencari data terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Abubakar (2021:90) observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara

wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti (informan). Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara bergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban. Menurut Murdiyanto (2020: 59) Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Menurut Hardani (2020:149-150) Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan penggunaan teknik dokumentasi adalah biaya yang relatif murah serta lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Namun, kelemahannya adalah data yang diambil cenderung sudah lama.

Selain itu, apabila terdapat kesalahan penulisan atau pencetakan dalam dokumen, peneliti berpotensi memperoleh data yang kurang akurat sehingga dapat memengaruhi hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2023:321) yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya. Dalam hal ini, menurut Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check* (Sugiyono, 2023: 365-371).

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dari urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga makin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.

STIA AMUNTAI

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 *Tentang Pengelolan Sampah*.
- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*
- Agustino Leo, Ph. D. 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Affrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Ariani, Atika. 2023. *Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung)*: STIA Amuntai
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: ALFABETA
- Dewi, D.S.K. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hardani Dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*). Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu
- Jayanti, Mira. 2022. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Banjaran Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten*. Skripsi. FISIP UNPAS: Universitas Pasundan
- Kurhayadi & Kushendar, D.H. 2023. *Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Indramayu: Penerbit Adab
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:ALFABETA.

Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Amuntai: STIA Amuntai.

